



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 624 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN JURI PENILAI BANJARMASIN SASIRANGAN FESTIVAL
SUB KEGIATAN PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK
PEMAJUAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Banjarmasin Sasirangan Festival yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin perlu menetapkan Juri Penilai Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Juri Penilai Banjarmasin Sasirangan Festival Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemasaran Kebudayaan Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM. 04/UM.001/MKP/08 tentang Sadar Wisata;
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 11 PM 17/PR.001/MKP/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2010-2014;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kebijakan Pembangunan Kebudayaan dan Pariwisata.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Juri Penilai Banjarmasin Sasirangan Festival Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Juri Penilai sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas menilai para peserta secara keseluruhan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 9 Oktober 2021



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN JURI PENILAI
 BANJARMASIN SASIRANGAN FESTIVAL
 SUB KEGIATAN PELINDUNGAN,
 PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK
 PEMAJUAN KEBUDAYAAN TAHUN 2021

DAFTAR JURI PENILAI BANJARMASIN SASIRANGAN FESTIVAL
 SUB KEGIATAN PELINDUNGAN, PENGEMBANGAN, PEMANFAATAN OBJEK
 PEMAJUAN KEBUDAYAAN TAHUN 2021

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM
1	TAJUDINNOOR,S.Pd	JURI PENILAI LOMBA FASHION CARNIVAL SASIRANGAN	Rp 600.000,-
2	SUHARYANTI,S.SN	JURI PENILAI LOMBA FASHION CARNIVAL SASIRANGAN	Rp 600.000,-
3	FAHMIANNOR	JURI PENILAI LOMBA FASHION CARNIVAL SASIRANGAN	Rp 600.000,-
4	Dr.dr.Hj. SITI WASILAH, M.Si,M.ed	JURI PENILAI LOMBA PUTERA SASIRANGAN- PUTERI MUSLIMAH SASIRANGAN	Rp 600.000,-
5	AGUS GAZALI RAHMAN /AGUS SASIRANGAN	JURI PENILAI PUTERA SASIRANGAN- PUTERI MUSLIMAH SASIRANGAN	Rp 600.000,-
6	DINA RAHMAWANTY	JURI PENILAI PUTERA SASIRANGAN- PUTERI MUSLIMAH SASIRANGAN	Rp 600.000,-
7	MUKHLIS MAMAN	JURI PENILAI PUTERA SASIRANGAN- PUTERI MUSLIMAH SASIRANGAN	Rp 600.000,-

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 18 November 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

Kabag. Perencanaan	Kabag. Hukum	Kabag. ...

8	ADITYA AGUSTA	JURI PENILAI PUTERA SASIRANGAN- PUTERI MUSLIMAH SASIRANGAN	Rp 600.000,-
---	---------------	---	--------------

WALI KOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA

Dinas Perindustrian	Kabupaten	A. AGUSTA
---------------------	-----------	-----------